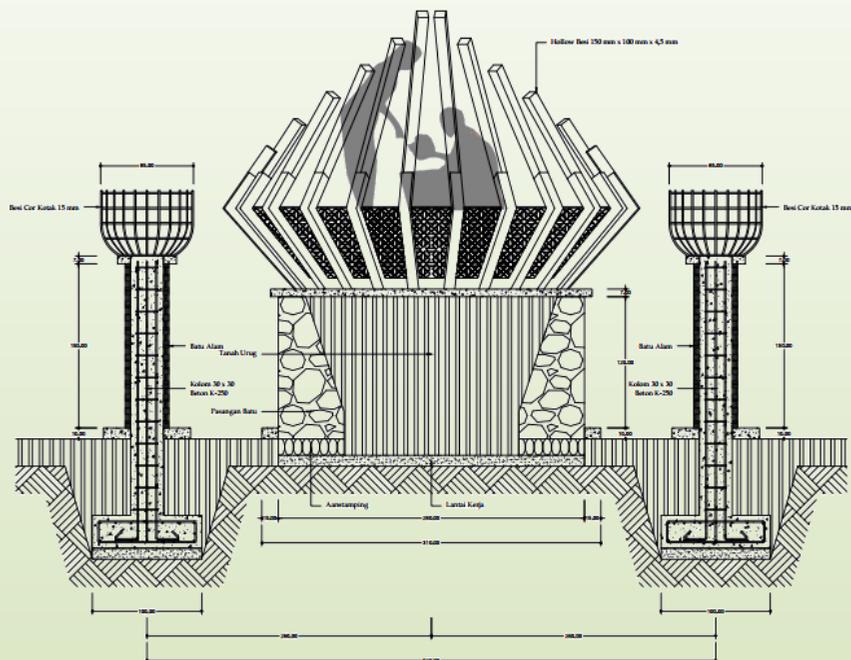




LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridhoNYA segala tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 secara umum berjalan baik. Sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dengan ini kami susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP OPD) Tahun 2024. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik/Instansi kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan baik termasuk dalam penyusunan laporan ini dan Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP tahun 2024 ini masih banyak kekurangan.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan selanjutnya membantu meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 17 Maret 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga



JOHAN ARIFIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19740520 199803 1 004

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	8
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	16
3.2 Realisasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas	73
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, adalah setiap akhir tahun anggaran setiap OPD wajib menyusun Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Guna mencapai terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih baik dan benar, efektif, efisien, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dalam pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran guna terwujudnya akuntabilitas, tranparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/ amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

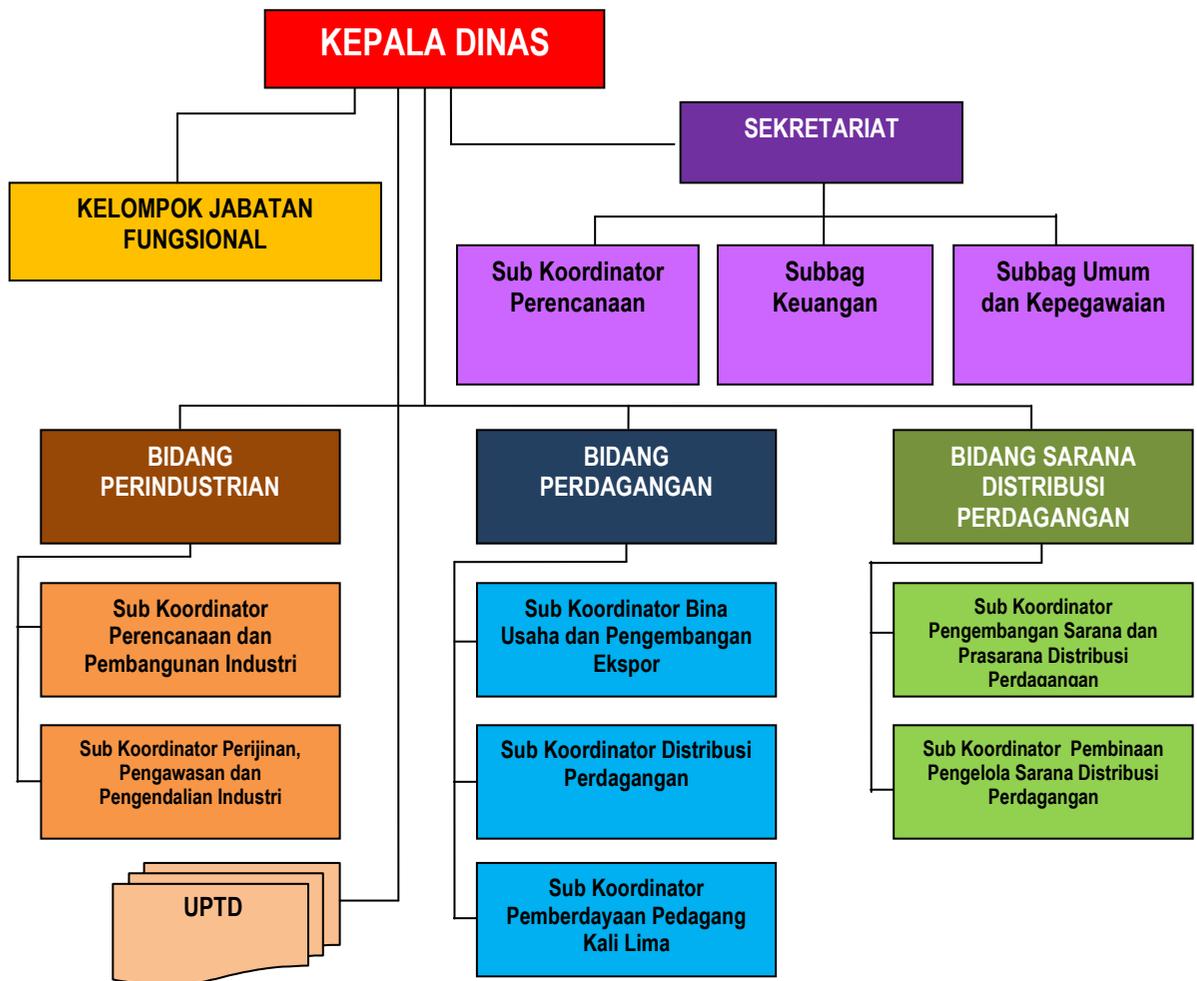
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 24 Kabupaten Purbalingga, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 65 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sekretaris Dinas : 1 orang
 2. Subbagian Keuangan : 1 orang
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian : 1 orang
 4. Sub Koordinator Perencanaan : 1 orang
3. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Perindustrian : 1 orang
 2. Sub Koordinator Perencanaan dan Pembangunan : 1 orang

Industri

3. Sub Koordinator Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Industri : 1 orang
4. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Perdagangan : 1 orang
 2. Sub Koordinator Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor : 1 orang
 3. Sub Koordinator Distribusi Perdagangan : 1 orang
 4. Sub Koordinator Pemberdayaan Pedagang Kali Lima : 1 orang
5. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan : 1 orang
 2. Sub Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan : 1 orang
 3. Sub Koordinator Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan : 1 orang
6. Kelompok Jabatan Fungsional : 6 orang
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) : 5 UPTD



b. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 seluruhnya sebanyak 195 orang, terdiri dari :

1. PNS	=	57 Orang
2. PTT	=	138 Orang
Jumlah	=	195 Orang

**JUMLAH PTT
DILIHAT DARI URUTAN PENDIDIKANNYA**

NO	URAIAN	PENDIDIKAN					JML
		SD	SMP	SMA/K	D3	S1	
1	PTT	9	15	98	4	12	138

**JUMLAH PNS
DILIHAT DARI URUTAN PENDIDIKANNYA**

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN										JML
		SD	SMP	SMA/K	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Laki-Laki	4	2	11			4		15	3		38
2	Perempuan			2			2		13	1		18
Jumlah		4	2	13			6		28	4		57

**JUMLAH PNS
DILIHAT DARI URUTAN KEPANGKATANNYA**

NO	JENIS KELAMIN	GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV					JML
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	Laki-Laki			3	1		5	5	6	6	2	6	3	1	1				39
2	Perempuan						2	1	5	1	2	6	1						18
Jumlah				3	1		7	6	11	7	4	12	4	1	1				57

Selengkapnya terlampir dalam DUK tahun 2024

c. Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk asset yang dikelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga saat ini menempati 2 (dua) buah gedung yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono Purbalingga, dimana satu buah gedung yang ditempati Bidang Perdagangan status tanahnya adalah milik Pemerintah Daerah Purbalingga dan satu gedung yang

ditempati Sekretariat dan Bidang Industri status tanahnya adalah masih milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk sarana operasional kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mempunyai kendaraan roda empat sebanyak 10 buah kendaraan, terdiri dari :

- 4 buah kondisi baik
- 4 buah kondisi tidak layak
- 1 buah kondisi sangat tidak layak dan rusak

Sedangkan kendaraan roda dua sebanyak 31 buah, dan roda tiga sebanyak 1 buah.

D. FUNGSI STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM). IKM berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kendati demikian, kondisi IKM tetap rawan karena keberpihakan bank yang rendah, pasar bebas yang mulai dibuka, serta terbatasnya kebijakan yang mendukung sektor usaha kecil. Untuk itu pengembangan IKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Program dan kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya IKM, disamping itu mampu memecahkan permasalahan utama yang selama ini sering dihadapi IKM antara lain :

1. Penggunaan teknologi yang rendah
2. Kemampuan pemasaran terutama e-commerce dan pasar global yang terbatas;
3. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (IKM, Usaha Besar dan BUMN);

4. Kelembagaan yang belum tertata dengan baik;

Sedangkan di Bidang Perdagangan permasalahan utama antara lain:

1. Kurang optimalnya ketepatan sasaran distribusi barang bersubsidi (pupuk dan LPG 3kg);
2. Masih terdapat pasar rakyat yang belum optimal kualitas sarana prasarana dan manajemen pengelolaannya;
3. Masih rendahnya kesadaran konsumen untuk menjadi konsumen cerdas;
4. Belum optimalnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas
- B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses strategis yang menyelaraskan visi dan misi Bupati dengan tujuan, sasaran, dan program kerja yang akan dijalankan. Dengan perencanaan kinerja yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan dan kebijakan mendukung terwujudnya visi dan misi pimpinan secara efektif dan efisien.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

a. Visi

Visi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 adalah :

“PURALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA“.

b. Misi

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan implementasi dari misi kabupaten yang ke – 5 yaitu :

- Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja ”.

2. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi Misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun kedepan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka perlu adanya perumusan kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur, serta sarana dan prasarana kerja;
2. Meningkatkan fasilitasi peningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana dan tehnologi di bidang industri dan perdagangan;
3. Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dan perdagangan;
4. Fasilitasi standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk industri;
5. Fasilitasi peningkatan daya saing dan produk industri;
6. Fasilitasi pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
7. Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting, barang strategis, barang bersubsidi serta barang perdagangan lainnya yang peredarannya perlu diawasi;
8. Pembinaan usaha dan kelembagaan perdagangan;
9. Penyediaan data dan informasi di bidang industri dan perdagangan;
10. Mengembangkan kemitraan di bidang industri dan perdagangan.

Indikator kinerja tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya kinerja sektor perindustrian dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan;
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan DINPERINDAG;

Dengan meningkatnya kinerja sektor perindustrian dan perdagangan menunjukkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Purbalingga menuju kearah yang lebih baik.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan renstra tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya saing sektor perindustrian dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku;
2. Peningkatan daya saing sektor perdagangan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB);
3. Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP DINPERINDAG
4. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dengan indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase penggunaan produk dalam negeri.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka program yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan bidang perindustrian dan perdagangan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
5. Program Pengembangan Ekspor
6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
8. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Adapun Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahunan dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

Tabel
Indikator Kinerja Dan Target Kinerja Tahunan Renstra

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Meningkatnya kinerja sektor perindustrian		Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,5	5	5	5,5	6
	Peningkatan Daya saing sektor perindustrian	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku	7.520.557	7.896.585	8.291.414	8.747.442	9.272.289
Meningkatnya kinerja sektor perdagangan		Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	4	4,5	4,5	5	5,5
	Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	67,97	68,27	68,57	68,87	69,17
	Peningkatan daya saing sektor perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	3.335.863	3.485.976	3.642.845	3.824.988	4.035.362

Namun seiring waktu, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah mengalami perubahan beberapa kali, perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya perubahan ini, organisasi dapat memastikan bahwa indikator dan target kinerja tetap relevan, dapat diukur, serta sesuai dengan kondisi terkini dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga ada dua yaitu adalah Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian dan Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	5
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rupiah (Juta)	8.291.414
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,5
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rupiah (Juta)	3.642.845
		Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	73,05
		Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	72,12

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), ditemukan bahwa masih ada indikator kinerja yang belum secara jelas menggambarkan kenaikan atau pencapaian yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian agar indikator kinerja lebih mencerminkan perkembangan nyata dan target yang lebih terukur.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, dilakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil evaluasi ini mengarah pada perubahan dan penyesuaian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada bulan April 2024. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator kinerja lebih representatif dalam mengukur peningkatan capaian, serta selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kinerja organisasi dapat lebih optimal, akuntabel, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. .

Tabel
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,50
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Persen	28,49
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,50
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	12,7
		Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	75
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINPERINDAG		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	42
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	73,05

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 telah melaksanakan 10 (sepuluh) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2024

sebesar Rp. 14.904.892.000,00 dengan Rincian anggaran untuk setiap Program adalah sebagai berikut :

Tabel
Pagu Anggaran Per Program Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	9.992.000
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.470.307.000
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	567.047.000
4	Program Pengembangan Ekspor	39.960.000
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	290.412.000
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100.000.000
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.696.072.000
8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	723.102.000
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	4.000.000
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	4.000.000
JUMLAH		14.904.892.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$92\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Purbalingga dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Bupati Purbalingga. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pencapaian target kinerja yang lebih optimal, Upaya Tindak Lanjut atas Strategi Peningkatan Kinerja menjadi langkah penting dalam memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun sebelumnya telah merangkum berbagai langkah konkret yang telah dilaksanakan serta strategi yang akan diterapkan di masa mendatang guna memperkuat akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program.

Tindak lanjut strategi peningkatan kinerja ini mencakup empat komponen utama yang menjadi landasan evaluasi dan pengembangan kebijakan yaitu :

- Komponen Perencanaan Kinerja menitikberatkan pada penyusunan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta program yang selaras dengan visi misi pembangunan (RPJMD dan Restra);
- Komponen Pengukuran Kinerja berperan dalam pemantauan capaian indikator secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Pemantauan / monitoring dilaksanakan setiap tiga bulan sekali terhadap capaian kinerja program/kegiatan, jika ditemukan permasalahan permasalahan akan ditindaklanjuti dan di evaluasi pada tribulan selanjutnya.

- Komponen Pelaporan Kinerja bertujuan untuk menyajikan hasil capaian kinerja secara transparan berbasis data, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;
- Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi kendala serta menyusun rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program di masa mendatang, evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Memasuki tahun 2024, sesuai dengan dokumen Perencanaan Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga terdapat tiga tujuan dan empat sasaran strategis yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya. Adapun tiga tujuan tersebut yaitu Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian, Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dan Meningkatnya kualitas kelembagaan DINPERINDAG dengan indikator capaiannya meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Nilai Kematangan Perangkat Daerah. Dengan tiga tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat mencapai empat sasaran yang menjadi tujuan utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yaitu Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian, Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan, Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Meningkatnya Implementasi SAKIP DINPERINDAG dengan indikator keberhasilan meningkatnya Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB), Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB), Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Nilai SAKIP DINPERINDAG.

Tabel
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(08)	(09)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,50	4,25	77,27	5,90
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Persen	28,49	28,27	99,23	28,55
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,50	5,35	97,27	5,90
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	12,7	12,65	99,61	12,85
		Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	75	71,16	94,88	80
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINPERINDAG		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	42	41	97,62	44
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	73,05	73,06	100,01	73,09
RATA RATA							95,13	

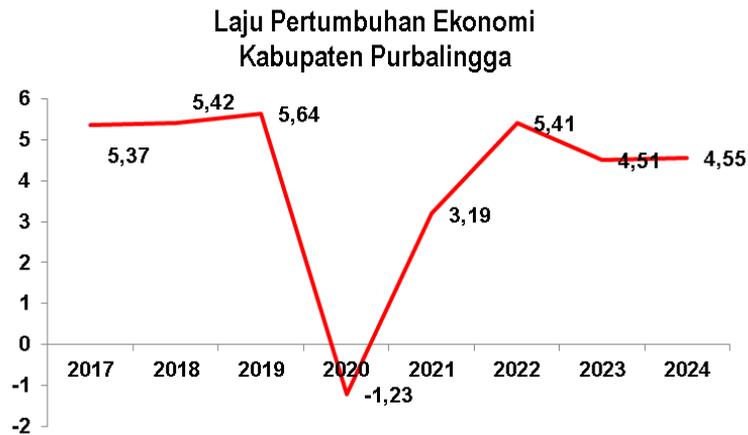
Dari tabel diatas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar **95,13% atau kategori sangat tinggi**.

Sejalan dengan prgram kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga juga mendukung tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan indikator capaiannya adalah persentase laju pertumbuhan sektor industri dan persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan.

Tabel Perbandingan
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah

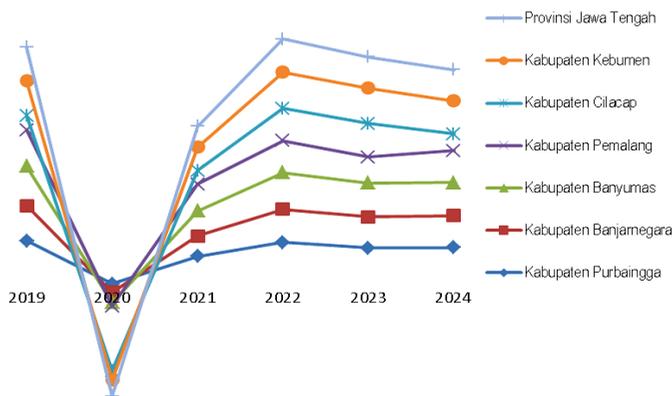
No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Realisasi Provinsi Jawa Tengah		Realisasi Kabupaten Purbalingga	
			2023	2024	2023	2024
1	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Persentase laju pertumbuhan sektor industri	4,32	3,52	5,1	4,25
2	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	4,93	4,16	5,37	5,35

Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 di grafik tahun 2024 sebesar 4,55% atau mengalami kenaikan sebesar 0,04% dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 4,51%. Jika dibanding Tahun 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar 5,41%.



Dari grafik diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan secara bertahap. Meskipun pertumbuhannya belum sepenuhnya kembali ke tingkat yang dicapai pada tahun 2022, tren penguatan ekonomi mulai terlihat. Berbagai faktor seperti peningkatan aktivitas sektor industri, perdagangan, serta program pemerintah daerah dalam mendorong investasi dan UMKM turut berkontribusi terhadap pemulihan ini. Namun, tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global dan faktor domestik masih mempengaruhi laju pertumbuhan sehingga pemulihan berjalan lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. Jika Dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya seperti Pematang, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, dan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Purbalingga menunjukkan pola yang relatif stabil, meskipun belum secepat beberapa daerah yang memiliki sektor unggulan lebih kuat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

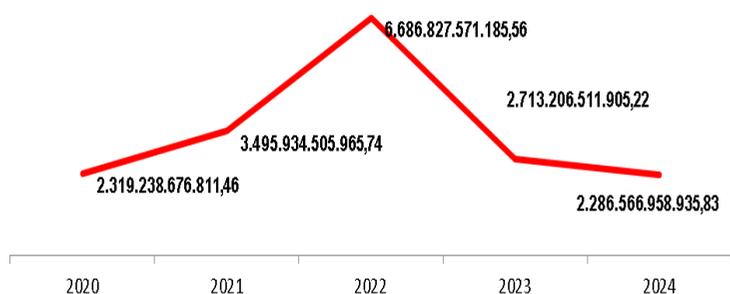


Sektor-sektor utama yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Purbalingga antara lain industri pengolahan, pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta jasa pendidikan. Industri pengolahan, khususnya produksi knalpot dan bulu mata, menjadi ikon Purbalingga dan memiliki daya saing tinggi baik di pasar nasional maupun internasional. Ekspor memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Sebagai daerah yang memiliki berbagai sektor unggulan, seperti industri manufaktur, kerajinan, dan pertanian, peningkatan aktivitas ekspor memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing produk lokal di pasar global. Sektor industri, khususnya industri bulu mata dan rambut palsu, menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Purbalingga yang telah menembus pasar internasional.

Tabel
Realisasi Ekspor Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s/d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Ekspor Kabupaten Purbalingga	2.319.238.676.811,46	3.495.934.505.965,74	6.686.827.571.185,56	2.713.206.511.905,22	2286566958935,83

Grafik Realisasi Ekspor Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024



Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing industri serta perdagangan, berbagai upaya strategis telah dilakukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatnya kinerja sektor perindustrian, meningkatnya kinerja sektor perdagangan, dan meningkatnya kualitas kelembagaan DINPERINDAG.

Peningkatan kinerja sektor perindustrian diwujudkan melalui penguatan industri kecil dan menengah (IKM), fasilitasi inovasi dan teknologi, serta peningkatan akses pasar bagi produk lokal. Berbagai program pembinaan, pendampingan, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha terus dikembangkan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri daerah.

Di sektor perdagangan, upaya dilakukan dengan memperluas jaringan pemasaran, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Pengembangan pasar ekspor dan fasilitasi pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang perdagangan internasional menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan sektor ini.

Selain itu, peningkatan kualitas kelembagaan DINPERINDAG menjadi faktor krusial dalam menunjang efektivitas pelayanan dan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan industri dan perdagangan. Reformasi birokrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem

tata kelola yang transparan dan akuntabel terus dilakukan guna mendukung perwujudan pelayanan yang lebih responsif dan profesional.

Dengan sinergi antara sektor industri, perdagangan, dan kelembagaan yang kuat, diharapkan perekonomian daerah semakin berkembang, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta daya saing produk lokal semakin unggul di pasar nasional maupun internasional.

Untuk pencapaian tujuan tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai macam strategi dan cara dalam meningkatkan daya saing baik dalam urusan perindustrian maupun perdagangan.

1. Urusan Perindustrian

a. Tujuan Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian dengan Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Tujuan meningkatnya kinerja sektor perindustrian adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah. Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan peningkatan kinerja sektor ini adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan. Dengan meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan, diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah produksi, penciptaan lapangan kerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Selain itu, pertumbuhan sektor ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan industri yang diterapkan, seperti peningkatan investasi, inovasi teknologi, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di tahun 2024 mencapai 4,25%, dibandingkan dengan PDRB tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,85% dari 5,10%. Penurunan ini disebabkan adanya tantangan dalam sektor industri, seperti kenaikan

biaya produksi, fluktuasi harga bahan baku, serta melemahnya permintaan pasar. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi global dan persaingan dengan daerah lain turut berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan masih menjadi salah satu pendorong utama ekonomi daerah, dengan berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mendorong inovasi, dan menarik lebih banyak investasi guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tabel Tujuan
Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Sat	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	7,32	-0,09	3,80	3,76	5,10	5,50	4,25	77,27
Nilai Realisasi Kinerja										Tinggi



- b. Sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian dengan Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)**

Sasaran utama dalam peningkatan daya saing sektor perindustrian adalah mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ini adalah persentase kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku (ADHB). Indikator ini mencerminkan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh industri pengolahan dalam suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh peningkatan produksi, investasi, dan efisiensi dalam proses manufaktur. Semakin tinggi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, semakin besar pula kontribusi industri terhadap perekonomian daerah, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing sektor industri secara keseluruhan. Untuk mencapai sasaran ini, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan kapasitas produksi, penerapan teknologi modern, penguatan rantai pasok, serta kebijakan yang mendukung inovasi dan investasi industri. Dengan demikian, sektor industri pengolahan dapat berkembang lebih pesat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara luas.

Target persentase kenaikan nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) tahun 2024 ditetapkan sebesar 28,49%, namun realisasinya hanya mencapai 28,27%, atau sekitar 99,23% dari target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu 28,29% pada tahun 2023, capaian tahun 2024 masih lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perlambatan pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tantangan dalam rantai pasok, fluktuasi harga bahan baku, kebijakan ekonomi, serta kondisi pasar global yang kurang stabil, yaitu menurunnya angka permintaan. Meskipun pencapaian 99,23% dari target, masih tetap menunjukkan bahwa sektor industri masih tetap berkembang, perlambatan ini

menjadi sinyal perlunya langkah strategis yang lebih optimal, seperti peningkatan investasi, adopsi teknologi canggih, efisiensi produksi, serta penguatan daya saing industri. Dengan upaya tersebut, diharapkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dapat lebih maksimal dan mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang

Tabel Sasaran
Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	%	27,61	28,07	27,82	28,29	28,49	28,27	99,23
Nilai Realisasi Kinerja								Sangat Tinggi



Walaupun capainya masih rendah tetapi masih ada tingkat keberhasilan dalam pencapaian, hal ini terlihat dari masih kuatnya kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian, meskipun belum mencapai target secara penuh, disamping itu juga dari data

BPS Purbalingga Dalam Angka 2025 Industri Pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga yaitu 28,27 persen atau sekitar 8.832 miliar rupiah.

Namun, dari sisi kegagalan, ketidakmampuan mencapai target yang lebih tinggi menandakan adanya tantangan struktural yang perlu diatasi. Beberapa kendala atau hambatan yang mempengaruhi pencapaian ini antara lain ketidakstabilan harga bahan baku, fluktuasi permintaan pasar, keterbatasan investasi, serta gangguan pada rantai pasok dan distribusi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis, seperti peningkatan efisiensi produksi melalui otomatisasi dan digitalisasi industri, penguatan kebijakan yang mendukung investasi dan daya saing industri, serta optimalisasi rantai pasok agar lebih stabil. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja industri dan peningkatan inovasi dalam proses manufaktur juga menjadi langkah penting guna memastikan pertumbuhan industri yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di tahun-tahun mendatang.

Untuk mendukung **Tujuan Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian** dengan Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan** dan **Sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian**, khususnya dengan indikator **Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)**, diperlukan implementasi berbagai program strategis seperti :

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri berfokus pada penyusunan kebijakan, pengembangan kawasan industri/ Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta peningkatan infrastruktur guna menciptakan iklim industri yang kondusif dan berdaya saing tinggi. Secara garis besar, program ini menitikberatkan pada pengembangan IKM dengan memberikan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi bagi pelaku industri agar mampu bersaing di pasar lokal,

nasional, dan internasional. Beberapa kegiatan utama dalam program ini meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial, fasilitasi peralatan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, serta pendampingan dalam hal legalitas usaha, sertifikasi produk, dan akses pembiayaan. Selain itu, program ini juga mencakup penguatan jejaring pemasaran dan digitalisasi IKM guna meningkatkan akses pasar dan daya saing produk. Dengan adanya program ini, diharapkan IKM dapat berkembang lebih pesat, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, serta mendorong pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung Program ini dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, sub kegiatan ini berfokus pada Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di era persaingan global yang semakin ketat, pelaku IKM dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang unggul, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Karena itu, pembinaan dan pengembangan SDM IKM menjadi prioritas untuk menciptakan pelaku usaha yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan yang meliputi Pelatihan Pengolahan Gula Kelapa; Pelatihan batik Ecoprint; Pelatihan Kerajinan dari Glagah; Pelatihan Kerajinan Gerabah. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 189.323.000,00 terserap sebesar Rp.182.878.729,00 atau 96,6% dan anggaran bersumber dari DBHCHT dan DAU.



Foto Kegiatan Pelatihan Pengolahan Gula Kelapa



Foto Kegiatan Pelatihan Batik Eco Print dan Kerajinan Glagah

- b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sub kegiatan ini berfokus pada upaya untuk mendorong pengembangan dan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM), melalui penyediaan fasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan pemasaran. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor kunci bagi keberlanjutan usaha IKM, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Adapun yang mendapatkan fasilitasi sarana prasarana yaitu IKM Gula Kelapa sebanyak 25 pelaku usaha, IKM Batik ecoprint sebanyak 25 pelaku usaha dan IKM Kerajinan Dari Glagah sebanyak 30 pelaku usaha. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 123.977.000,00 terserap sebesar Rp.

122.486.899,00 atau 98,8% dan anggaran bersumber dari DBHCHT dan DAU.



Foto Kegiatan Bantuan IKM Pengolahan Gula Kelapa

- c) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sub kegiatan ini untuk mengawal Surat Rekomendasi dari Dinperindag Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat untuk mengajukan dan pembahasan Draft Raperda Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RIPIK) Kabupaten Purbalingga ke BIRO Hukum Provinsi Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RIPIK) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan utama dalam pengembangan sektor industri di tingkat daerah. RIPIK disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, yang menggarisbawahi pentingnya perencanaan industri yang terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi serta keunggulan daerah. RIPIK berfungsi untuk memberikan arah, strategi, dan kebijakan dalam pengembangan industri daerah. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 8.830.000,00

terserap sebesar Rp. 8.829.500,00 atau 99,99 % dan anggaran bersumber dari DAU

d) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sentra Industri adalah area yang lebih kecil dibandingkan kawasan industri dan difokuskan pada industri kecil dan menengah (IKM). Di kabupaten Purbalingga baru ada dua sentra industri yang sudah direvitalisasi yaitu sentra industri kerajinan batok kelapa Purbalingga Wetan dan Sentra industri kecil logam/LIK Logam Purbalingga Lor yang pengelolaannya di bawah UPTD Pengembangan Logam. Didalam LIK Logam ada sekitar 32 industri kecil yang mayoritas bergerak di usaha knalpot dan sisanya adalah perbengkelan logam. Untuk operasional UPTD Logam diperlukan anggaran sebesar Rp. 400.972.000,00 melalui sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, anggaran terserap sebesar Rp. 390.573.934,00 atau 97,41. Anggaran tersebut digunakan untuk operasional seperti membayar listrik, air, pemeliharaan mesin dan gedung, honorarium tenaga operator mesin dan sebagainya. Ditahun 2024 UPTD/LIK Logam juga telah memberikan pendapatan daerah sebesar Rp.481.088.000,00 dari target Rp. 360.000.000,00 atau tercapai 133,64% dan anggaran bersumber dari DAU.

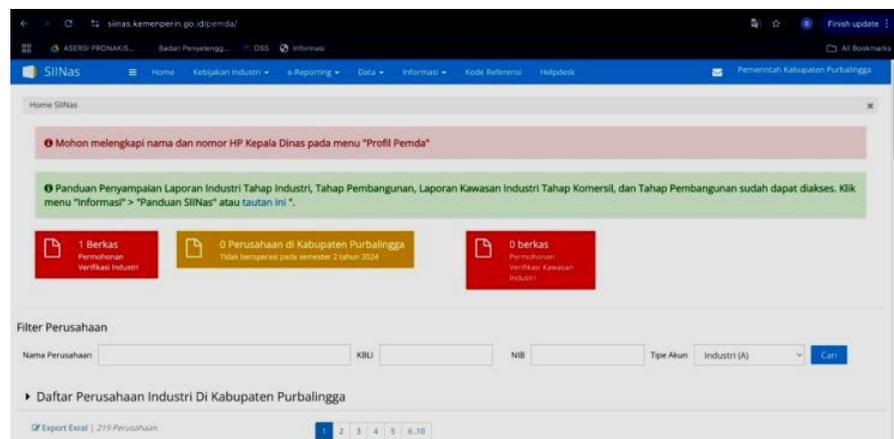
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kepatuhan industri terhadap regulasi, serta memastikan pertumbuhan sektor industri yang terarah dan berkelanjutan. Setelah diterapkannya perizinan satu atap melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Online Single Submission (OSS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah

tidak lagi mengeluarkan izin usaha industri, tapi berfokus pada pengendalian izin usaha industri. Pengendalian izin usaha industri berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pelaku industri agar mematuhi izin usaha yang telah diterbitkan dan menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan standar yang berlaku. Lingkup kegiatan ini meliputi Pemberian dan Verifikasi Izin Usaha atau Pemberian Rekomendasi Teknis, Pemantauan dan Pengawasan Industri, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran, Digitalisasi Perizinan dan Pengawasan dan Evaluasi Berkala Izin Usaha. Ditahun 2024 hanya ada dua surat rekomendasi teknis usaha industri yang dikeluarkan yaitu dari PR. MAMURUDIN Industri Sigaret Kretek Tangan dan PDAM Industri Air Kemasan. Sedang kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Industri sejumlah 16 perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan alokasi anggaran Rp. 4.000.000,00 melalui sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi sebesar Rp. 3.962.500,00 atau 99,06% dan anggaran bersumber dari DAU.

- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) berperan dalam menyediakan data industri yang akurat dan real-time, yang dapat digunakan untuk analisis kebijakan, pemantauan kinerja industri, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, data dan informasi menjadi aset strategis dalam pengelolaan sektor industri. Untuk mewujudkan tata kelola industri yang transparan, efisien, dan berdaya saing, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melaksanakan Program Pengelolaan Data dan Informasi Industri yang terintegrasi dengan SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Dengan menyediakan data yang akurat, terkini, dan mudah diakses, akan menjadi pondasi dalam mendukung pembangunan industri nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Disamping itu SIINas juga berfungsi sebagai platform digital berbasis web yang memungkinkan

pelaku industri, pemerintah daerah, dan masyarakat mengakses informasi industri secara real-time. Sistem ini mencakup berbagai fitur, seperti registrasi industri, pelaporan produksi, monitoring kepatuhan regulasi, hingga dashboard interaktif yang menampilkan analisis dan tren data industri nasional.

Sampai dengan tahun 2024 perusahaan yang sudah masuk dalam daftar SIINas sejumlah 213 perusahaan, yang belum melaporkan sejumlah 22 perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00 melalui sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), anggaran terserap sebesar Rp.3.927.000,00 atau 98,18% dan anggaran bersumber dari DAU.



Dashboard Aplikasi SIINas

Dengan sinergi ketiga program ini, diharapkan pertumbuhan industri pengolahan dapat lebih optimal, produktivitas meningkat, dan daya saing industri nasional semakin kuat dalam menghadapi persaingan global.

2. Urusan Perdagangan

a. Tujuan Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dengan Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Tujuan utama dari meningkatnya kinerja sektor perdagangan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan aktivitas perdagangan barang dan jasa. Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan ini adalah pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, yang mencerminkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menunjukkan adanya peningkatan transaksi perdagangan, daya beli masyarakat yang lebih baik, serta efisiensi dalam distribusi barang dan jasa.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan strategi seperti penguatan infrastruktur perdagangan, pengembangan ekosistem digital untuk mendukung perdagangan elektronik (e-commerce), serta fasilitasi akses pasar bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, peningkatan kinerja sektor perdagangan juga dapat didukung melalui kebijakan yang mendorong iklim usaha yang kondusif, penguatan rantai pasok, serta promosi ekspor produk unggulan daerah. Dengan implementasi strategi tersebut, diharapkan sektor perdagangan dapat terus tumbuh, berkontribusi lebih besar terhadap PDRB, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas.

Target Realisasi PDRB sektor perdagangan tahun 2024 ditetapkan sebesar 5,50%, namun realisasinya hanya mencapai 5,35%, atau sekitar 97,27% dari target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu 5,37% pada tahun 2023, capaian tahun 2024 masih lebih rendah. Walaupun capaiannya rendah akan tetapi sektor perdagangan masih termasuk sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Daerah.

Dari data BPS Purbalingga Dalam Angka sektor perdagangan telah memberikan kontribusi sebesar 3.934 miliar rupiah.

Melihat dari sisi keberhasilan, pencapaian target ini tetap mencerminkan aktivitas perdagangan yang relatif stabil, meskipun terdapat tantangan ekonomi. Namun, dari perspektif kegagalan, tidak tercapainya target dan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya tantangan struktural dan eksternal yang perlu segera diatasi.

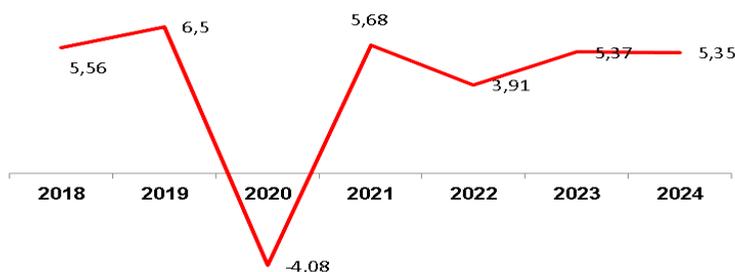
Beberapa kendala atau hambatan yang mempengaruhi pencapaian ini antara lain melemahnya daya beli masyarakat, fluktuasi harga barang dan jasa, ketidakstabilan ekonomi global, serta gangguan pada rantai pasok yang berdampak pada distribusi barang.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis, seperti mendorong digitalisasi perdagangan untuk meningkatkan akses pasar, memberikan insentif kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), memperkuat infrastruktur logistik dan distribusi, serta mengoptimalkan kebijakan yang mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perdagangan dapat tumbuh lebih optimal dan kembali mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.

Tabel Tujuan
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Sat	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,50	-4,08	5,68	3,91	5,37	5,50	5,35	97,27
Nilai Realisasi Kinerja										Sangat Tinggi

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan



Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PDRB sub sektor perdagangan selama tahun 2024 antara lain:

1. Pembinaan dan pengawasan pada distributor-distributor LPG, pupuk, SPBU, distributor KEPOKMAS dan barang penting/strategis lainnya;
2. Kemudahan dalam pemberian surat rekomendasi perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan penerbitan tanda daftar gudang;
3. Revitalisasi pasar rakyat;
4. Perlindungan konsumen melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;

b. Sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan dengan Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)

Sasaran peningkatan daya saing sektor perdagangan dengan indikator kinerja persentase kenaikan nilai PDRB sektor perdagangan atas dasar harga berlaku (ADHB) bertujuan untuk mendorong penguatan ekonomi lokal melalui perdagangan yang kompetitif dan produktif. Strategi ini melibatkan pengembangan pasar regional, peningkatan aksesibilitas produk lokal ke pasar nasional dan internasional, serta penguatan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Persentase kenaikan nilai PDRB sektor perdagangan daerah mencerminkan keberhasilan

dalam meningkatkan kontribusi perdagangan terhadap ekonomi lokal, baik melalui pertumbuhan volume perdagangan maupun nilai transaksi. Dengan pencapaian indikator ini, sektor perdagangan daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat regional.

Target persentase kenaikan nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) tahun 2024 ditetapkan sebesar 12,7%, namun realisasinya hanya mencapai 12,65%, atau sekitar 99,61% dari target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu 12,60% pada tahun 2023, capaian tahun 2024 masih mengalami kenaikan 0,05%.

Realisasi persentase kenaikan nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) tahun 2024 yang hanya mencapai 12,65% dari target 12,7%, atau sekitar 99,61%, menunjukkan bahwa meskipun target belum sepenuhnya tercapai, sektor perdagangan masih mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,60% pada 2023, dengan kenaikan sebesar 0,05%. Dari sisi keberhasilan, capaian ini mencerminkan bahwa sektor perdagangan tetap tumbuh secara positif di tengah berbagai tantangan ekonomi, meskipun dengan laju yang lebih lambat.

Namun, dari perspektif kegagalan, tidak tercapainya target secara penuh menunjukkan bahwa masih terdapat faktor penghambat yang perlu diatasi. Beberapa kendala atau hambatan yang mempengaruhi pencapaian ini antara lain fluktuasi daya beli masyarakat, ketidakstabilan harga barang dan jasa, keterbatasan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta gangguan rantai pasok akibat kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

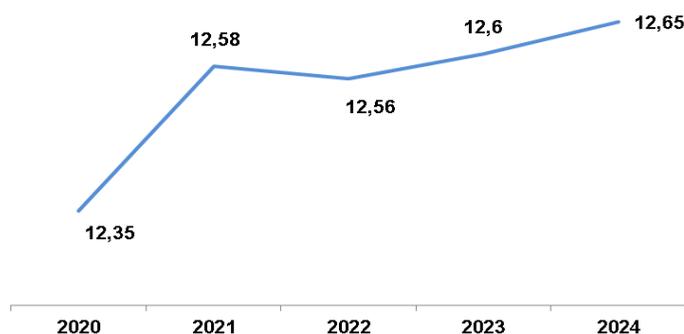
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan beberapa solusi strategis, seperti penguatan ekosistem perdagangan digital untuk memperluas akses pasar, optimalisasi kebijakan stabilisasi harga dan

daya beli, peningkatan investasi di sektor logistik dan distribusi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha guna meningkatkan daya saing mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perdagangan dapat tumbuh lebih optimal, mencapai target yang lebih tinggi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian di tahun-tahun mendatang

**Tabel Sasaran
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	%	12,35	12,58	12,56	12,60	12,70	12,65	99,61
Nilai Realisasi Kinerja									Sangat Tinggi

Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)



Dalam upaya meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan di tahun 2024 antara lain melalui :

1. Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan yaitu melalui Rehabilitasi/Pembangunan Pasar Rakyat;
2. Peningkatan nilai ekspor melalui pelatihan SDM di bidang ekspor impor;

3. Pengawasan Barang Kepokmas, Barang Penting dan Strategis seperti beras, minyak, kedelai dan lain-lain;
4. Pengawasan Barang Bersubsidi seperti elpiji dan pupuk;

Untuk mendukung **Tujuan Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan** dengan Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan** dan **Sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan**, khususnya dengan indikator **Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)**, diperlukan implementasi berbagai program strategis yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas sektor ini, seperti :

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi usaha guna menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan legalitas usaha yang lebih terjamin. Setelah diberlakukannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Online Single Submission (OSS), dalam urusan perizinan di bidang perdagangan, Dinperindag berperan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi teknis, rekomendasi teknis untuk perizinan, pengawasan dan penegakan regulasi dan pembinaan pelaku usaha. Di tahun 2024 rekomendasi teknis yang dikeluarkan sejumlah 11, yang terdiri dari 4 untuk izin toko modern dan 7 untuk izin gudang, sedang dalam OSS Dinperindag berperan dalam verifikasi izin usaha. Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.996.000,00 melalui sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik), anggaran terserap sebesar Rp.3.458.700,00 atau 69,23%. Sedang untuk izin pergudangan diperlukan anggaran Rp. 4.996.000,00 melalui sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan serapan anggaran Rp. 4.735.600,00 atau 94,79%.

- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan berfokus pada pengembangan infrastruktur dan jaringan distribusi untuk memastikan kelancaran arus barang dari produsen ke konsumen.

Di tahun 2024 program ini diarahkan pada pembangunan, revitalisasi, dan optimalisasi sarana distribusi, seperti pasar rakyat, PKL, gudang logistik, dan terminal perdagangan seperti STA Kutabawa. Program ini juga mendukung digitalisasi sistem distribusi untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Dalam melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan dengan dua kegiatan yaitu :

- a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk mendukung penguatan sistem perdagangan daerah, kegiatan ini meliputi sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan seperti pembangunan dan pemeliharaan pasar rakyat dan sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan seperti pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat yang bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Kegiatan yang telah dilakukan Dinperindag terkait Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan di tahun 2024 adalah Pembangunan Paving Pasar Rakyat Badog Bancar, Pengaspalan Jalan Lingkar Taman Pasar Rakyat Segamas, REHAB PASAR RAKYAT BOBOTSARI, Urugan Tanah Pasar Rakyat Badog Bancar dan Pembuatan Toilet Pasar Rakyat Panican Ber – SNI. Anggaran untuk melaksanakan sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp. 959.353.000,00 terserap sebesar Rp. 954.457.145,00 atau 99,49% dan anggaran bersumber dari DAU.



Foto Kegiatan Paving dan Pengurugan Pasar Badog



Foto Kegiatan Pengaspalan Lingkar Taman Pasar Segamas, dan Perbaikan Tanggal Pasar Bobotsari

Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan kegiatan operasional yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan optimalisasi sarana distribusi perdagangan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan ini mencakup pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur yang menunjang distribusi barang dan jasa, termasuk pengelolaan pasar rakyat. Dalam hal ini, fasilitas difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan terhadap 21 pasar yang menjadi bagian dari jaringan distribusi perdagangan seperti belanja listrik, air, internet, alat-alat kebersihan pasar, belanja untuk pemeliharaan pasar dan lain sebagainya yang terkait dengan beroperasionalnya pasar. Dengan pendekatan yang terintegrasi, fasilitas ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,

meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar-pasar. Anggaran yang diperlukan untuk mendukung sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp. 3.446.785.000,00, terealisasi sebesar Rp.3.342.099.601,00 atau 96,96% dan anggaran bersumber dari DAU.

- b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, merupakan kegiatan untuk operasional Purbalingga Food Center (PFC) dan Curgecang Kuliner Center (CKC). Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan pengelolaan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan sehingga mendukung operasional PFC dan CKC sebagai pusat perdagangan dan kuliner unggulan di wilayah Purbalingga, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tetapi juga mampu menarik pengunjung dari luar daerah. Anggaran yang diperlukan untuk mendukung sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya sebesar Rp. 64.169.000,00, terealisasi sebesar Rp. 64.053.750,00 atau 99,82 % dan anggaran bersumber dari DAU.

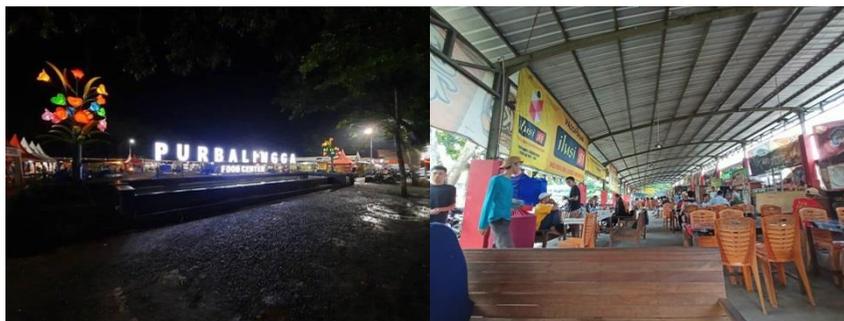


Foto Purbalingga Food Center (PFC) dan Curgecang Kuliner Center (CKC)

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan harga di pasar serta memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok (Bapok) dan barang penting (Bapokting) untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, fluktuasi harga pasar, serta momen-momen seperti hari besar keagamaan, program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan kestabilan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Purbalingga. Dalam menjaga Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting di Kabupaten Purbalingga, Dinperindag melakukan berbagai strategi melalui beberapa kegiatan :

a) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk mewujudkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, maka perlu adanya jaminan ketersediaan barang di tingkat agen maupun pasar rakyat, apakah ketersediaan stok barang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak, jangan sampai ketika ketersediaan stok barang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mengakibatkan harga menjadi tinggi, untuk itu perlu adanya koordinasi yang baik antar pemangku jabatan terkait/stakeholder agar memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan ketersediaan stok barang dilapangan. Dalam rangka menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dinperindag melakukan dua kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Ketersediaan barang kebutuhan pokok (Bapok) dan barang penting (Bapokting) merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Upaya Koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat agen dan pasar rakyat menjadi langkah strategis guna memastikan distribusi barang berjalan lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dinperindag secara aktif melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, distributor, dan pengelola pasar rakyat, dengan tujuan untuk memetakan ketersediaan dan kebutuhan barang, menyelaraskan data ketersediaan barang dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, menentukan pola distribusi barang agar tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, khususnya di wilayah yang mengalami kelangkaan, dan menciptakan koordinasi yang baik antara pemerintah, distributor, dan pelaku pasar rakyat guna mencegah terjadinya masalah dalam pendistribusian barang. Dengan kegiatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa stok barang kebutuhan pokok dan penting tetap mencukupi di pasar rakyat, terutama menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi lonjakan permintaan. Anggaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 11.288.000,00, terserap sebesar Rp. 11.060.000,00 atau 97,98% dan anggaran bersumber dari DAU.

- Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Untuk Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting maka perlu adanya pengawasan ketersediaan barang, untuk itu koordinasi dengan para pelaku usaha, distributor, dan pengelola pasar rakyat sangat diperlukan agar pengendalian ketersediaan barang dapat

dilaksanakan, guna memastikan bahwa ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting tetap mencukupi di pasar rakyat, terutama menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi lonjakan permintaan. Pengendalian barang dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui :

- Pemantauan Stok dan Harga Secara Berkala: Tim pengawas/TPID melakukan monitoring langsung ke agen, distributor, dan pasar rakyat untuk mengevaluasi ketersediaan barang serta memantau perubahan harga.
- Penegakan Aturan Distribusi: Menindak tegas praktik yang dapat mengganggu distribusi, seperti penimbunan barang atau spekulasi harga.
- Penguatan Peran Agen dan Pasar Rakyat: Memberikan pendampingan kepada agen dan pengelola pasar rakyat agar mampu mengelola distribusi barang dengan efisien dan transparan.
- Intervensi melalui Operasi Pasar: Apabila ditemukan indikasi kekurangan pasokan atau lonjakan harga yang tidak wajar, maka akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan barang.

Anggaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.535.280.000,00, anggaran terserap sebesar Rp. 524.021.750,00 atau 97,9% dan anggaran bersumber dari DAU



Foto Kegiatan Operasi Pasar Beras dan Minyak Goreng

b) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok sangat diperlukan untuk menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Stabilitas harga merupakan faktor krusial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi rentan yang sangat bergantung pada keterjangkauan harga barang kebutuhan sehari-hari. Dengan pengendalian yang tepat, ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat terjamin, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan inflasi dapat dikendalikan. Agar pengendalian harga dan stok barang dapat berjalan maka diperlukan langkah langkah pemantauan harga dan stok, dalam pengendalian harga Dinperindag melakukan monitoring harga barang kebutuhan pokok setiap harinya di tiga Pasar Besar yaitu Pasar Segamas, Bobotsari dan Bukateja, apalagi dengan adanya Aplikasi SIMHP akan lebih memudahkan masyarakat untuk melihat harga harga kebutuhan pokok di tiga pasar. Anggaran yang diperlukan dalam rangka kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting adalah sebesar Rp. 14.485.000,00, yaitu melalui sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. Anggaran terserap sebesar Rp. 14.414.300,00 atau 99,51% dan anggaran bersumber dari DAU.



Dashboard Aplikasi SIMHP

c) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pupuk dan pestisida bersubsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung produktivitas pertanian serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertanian memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan distribusi yang lancar, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. Dinperindag berperan dalam mengawasi kelancaran distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer resmi. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah kelangkaan, penimbunan, serta praktik penjualan dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sedangkan Dinas Pertanian memiliki peran utama dalam perencanaan dan pendistribusian pupuk serta pestisida bersubsidi kepada petani yang berhak. Melalui sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), Dinas Pertanian memastikan bahwa alokasi subsidi diberikan secara tepat sesuai kebutuhan dan luas lahan pertanian.

Anggaran yang diperlukan dalam rangka kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah sebesar Rp. 5.994.000,00, yaitu melalui sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Anggaran terserap

sebesar Rp. 5.772.300,00 atau 96,3% dan anggaran bersumber dari DAU.



Foto Kegiatan Rakor dan Pengawasan Pupuk

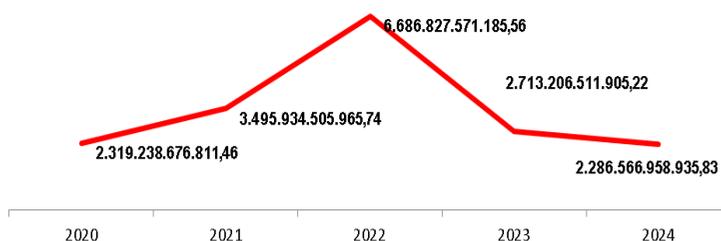
- 4) Program Pengembangan Ekspor bertujuan untuk memperluas akses pasar internasional bagi produk dalam negeri melalui fasilitasi ekspor, promosi dagang, dan penguatan daya saing produk lokal. Program Pengembangan Ekspor diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global melalui pelatihan ekspor-impor bagi pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur ekspor, regulasi perdagangan internasional, strategi pemasaran global, serta pengelolaan logistik dan kepabeanan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor. Pelatihan “Bagaimana Memulai Ekspor” merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk membekali pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memasuki pasar global. Pelatihan ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Sekjend. Kementerian Perdagangan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan calon eksportir, mengenai

langkah-langkah praktis dalam memulai ekspor. Peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 30 peserta, dilaksanakan selama 3 hari. Selain melaksanakan kegiatan pelatih Dinperindag tiap tahun rutin juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ekspor-impor tiap 3 (tiga) bulan sekali. Kegiatan monev ini untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai arus perdagangan internasional, data ini juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, mengidentifikasi tren perdagangan, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Tabel Realisasi Ekspor

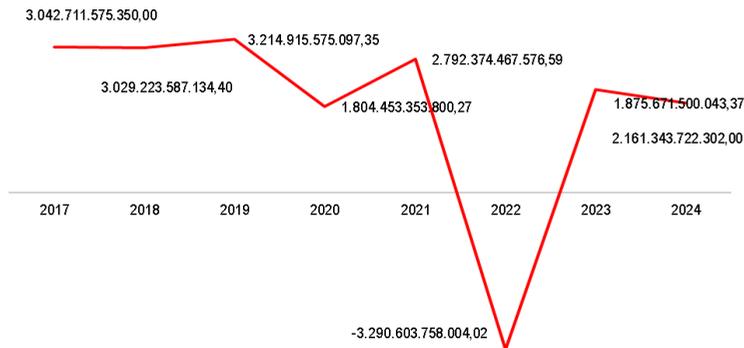
Uraian	2021	2022	2023	2024
REALISASI EKSPOR KABUPATEN PURBALINGGA	3.495.934.505.965,74	6.686.827.571.185,56	2.713.206.511.905,22	2.286.566.958.935,83

Realisasi Ekspor Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024



Realisasi ekspor tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -15,7% di karenakan akibat menurunnya permintaan di pasar global. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perlambatan ekonomi di negara mitra dagang, fluktuasi harga komoditas, serta ketidakpastian geopolitik dan kebijakan perdagangan internasional. Neraca Perdagangan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 juga mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar

Rp.285.672.222.258,63 dan ditahun 2024 sebesar
Rp.1.875.671.500.043,37.



Adapun perusahaan penyumbang nilai ekspor Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Daftar Nama Perusahaan Ekspor

NO	NAMA PERUSAHAAN	EKSPOR	IMPOR	JUMLAH EKSPOR RIIL
1	PT. ROYAL KORINDAH	164.959.929.639	23.655.375.915	141.304.553.724
2	PT. HYUP SUNG INDONESIA	45.942.631.918	7.597.583.995	38.345.047.923
3	PT. INDOKORES SAHABAT	286.003.546.583	156.575.455.615	129.428.090.968
4	PT. YURO MUSTIKA	49.363.881.062	3.742.456.658	45.621.424.403
5	PT. SUNG CHANG INDONESIA	465.589.158.106	65.938.197.480	399.650.960.626
6	PT. KESAN BARU SEJAHTERA	31.940.396.941	2.677.044.500	29.263.352.441
7	PT. HASTA PUSAKA SENTOSA (WIG)	9.879.142.216	81.306.673	9.797.835.543
8	PT. SUNG SHIM INTERNASIONAL	30.880.386.509	1.748.475.988	29.131.910.521
9	PT. HANMI HAIR INDONESIA	50.011.398.789	7.161.085.791	42.850.312.998
10	PT. BOYANG INDUSTRIAL	279.983.842.125	57.745.707.777	222.238.134.349
11	PT. INTERWORK INDONESIA	5.639.414.890	230.453.740	5.408.961.150
12	PT. MILAN INDONESIA	32.915.439.762	3.072.765.197	29.842.674.564
13	PT. WON JIN INDONESIA	6.040.028.399	991.544.685	5.048.483.714
14	PT. SOPHIAN INDONESIA	16.334.010.312	1.085.618.834	15.248.391.478
15	PT. JHON TOYS INDONESIA (BONEKA)	47.177.554.110	4.168.668.600	43.008.885.510
16	PT. MAHKOTA ESTETIKA ABADI	2.406.313.304	144.739.494	2.261.573.810
17	PT VICTORIA BEAUTY INDUSTRIAL	133.233.592.854	63.129.224.734	70.104.368.120
18	PT. TIGA PUTRA ABADI PERKASA	10.665.841.320	0	10.665.841.320

NO	NAMA PERUSAHAAN	EKSPOR	IMPOR	JUMLAH EKSPOR RIIL
19	PT. SUNSTARINDO WIRAHUSADA	12.602.044.996	34.135.567	12.567.909.429
20	PT. SHINHAN CREATINDO	0	0	0
21	PT. BINTANG MAS TRIYASA	44.812.405.165	2.320.481.131	42.491.924.034
22	PT. SINAR CENDANA ABADI	26.334.232.714	1.364.571.392	24.969.661.322
23	PT. MAHTOKA TRI ANGJAYA (BULU MATA)	47.292.583.739	4.722.632.752	42.569.950.987
24	PT. ROSA SEJAHTERA EYELASHES	7.043.697.895	264.194.865	6.779.503.030
25	PT. BIMA NUGRAHA	27.816.028.889	72.000.000	27.744.028.889
26	PT. KARYA BHAKTI MANUNGGAL	48.700.701.751	183.259.200	48.517.442.551
27	PT. MAJAPURA	63.984.296.074	0	63.984.296.074
28	CV. PURBAYASA	195.219.845.499	2.188.478.309	193.031.367.190
29	CV. SN JAYA PRIMA	36.326.552.986	0	36.326.552.986
30	CV. PHOENIX AGUNG PRIMA (KAYU LAPIS)	98.700.305.525	0	98.700.305.525
31	CV. RAYUNG PELANGI	0	0	0
32	PT. RAYUNG PELANGI NUSANTARA	3.184.270.000	0	3.184.270.000
33	PT. CAYA AKUSARA INDONESIA	0	0	0
34	PT. BINTANG SEMESTA ADIGUNA	0	0	0
35	PT. STELLARIS INTERNATIONAL	0	0	0
36	PT SERASI GAYA BUSANA	0	0	0
37	PT TRESSINDO ABADI CEMERLANG	0	0	0
38	CV BUNGA PALM	5.583.484.862	0	5.583.484.862
JUMLAH		2.286.566.958.936	410.895.458.892	1.875.671.500.043

Anggaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.39.960.000,00, anggaran terserap sebesar Rp. 39.753.618,00 atau 99,48% dan anggaran bersumber dari DAU.



Foto Kegiatan Pelatihan Ekspor

- 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen difokuskan pada peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi dan pengawasan, serta penguatan hak-hak konsumen dalam aktivitas perdagangan. Dengan implementasi program-program strategis ini, diharapkan sektor perdagangan dapat berkembang lebih pesat, lebih kompetitif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Untuk itu pelaksanaan Metrologi Legal, yang meliputi kegiatan tera, tera ulang, dan pengawasan, memiliki peran yang sangat vital untuk melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi. Dengan pelaksanaan metrologi legal memastikan bahwa produk dan alat ukur yang digunakan dalam transaksi dan perdagangan memenuhi standar yang tepat dan terukur dengan akurat sehingga perlindungan langsung kepada konsumen dapat terwujud. Ditahun 2024 tera teraulang UTTP yang telah dilakukan sebanyak 22.632 unit, untuk pengawasan UTTP yang diawasi sebanyak 1.102 unit dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) sebanya 26 produk.

Anggaran yang diperlukan dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan adalah sebesar Rp.290.412.000,00, yaitu melalui sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang. Anggaran terserap

sebesar Rp. 288.524.764,00 atau 99,35% dan anggaran bersumber dari DAU.



Foto Kegiatan Metrologi Legal UTTP

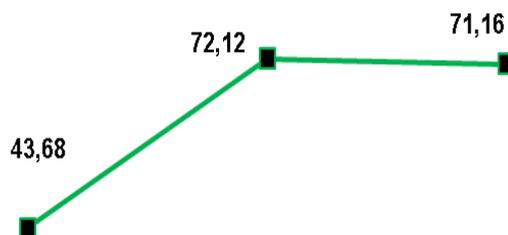
c. Sasaran Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan Indikator Kinerja Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sasaran utama dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri adalah untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, mengurangi ketergantungan pada produk impor, serta memperkuat daya saing usaha dalam negeri. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah persentase penggunaan produk dalam negeri, yang mencerminkan seberapa besar produk-produk lokal digunakan dalam berbagai sektor, baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum. Semakin tinggi persentase penggunaan produk dalam negeri, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas produksi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Hanya saja penggunaan Indikator Kinerja Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri lingkungannya masih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Indikator Kinerja Prosentase penggunaan produk dalam negeri ditahun 2024 ditarget sebesar 75%, terealisasi sebesar

71,16% dengan capaian hanya sampai 94,88%, kalau dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 72,12%, masih dibawahnya.

Prosentase Penggunaan Produk Dalam Negeri



**Tabel Sasaran
Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	NA	43,68	72,12	75	71,16	94,88
Nilai Realisasi Kinerja								Sangat Tinggi

Dalam menerapkan penggunaan produk dalam negeri di Instansi Pemerintah Derah Kabupaten Purbalingga, banyak sekali hambatan yang dihadapi.

1) Hambatan/Kendala yang Dihadapi

- Banyak produk dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor dalam hal kualitas;
- Masih banyak UKM yang belum masuk E-Katalog Lokal;

2) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

- Mendorong inovasi produk dengan memberikan dukungan penelitian dan pengembangan (R&D) kepada industri lokal bekerjasama dengan akademisi/universitas;

- Sosialisasi kepada UKM tentang E-Katalog lokal;

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat industri nasional dan meningkatkan perekonomian domestik melalui kebijakan penggunaan minimal 40% Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk lokal dalam berbagai sektor, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong pertumbuhan industri nasional yang lebih mandiri dan berdaya saing, hal mendasar pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Di tahun 2024 melalui Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, Dinperindag menyusun Roadmap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Roadmap ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Purbalingga bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Purbalingga kedepannya disamping itu juga bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan P3DN di Kabupaten Purbalingga. Anggaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00, anggaran terserap sebesar Rp. 99.745.000,00 atau 99,75% dan anggaran bersumber dari DAU.



Foto Kegiatan Penyusunan Road Map PDN 2025 - 2029

d. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DINPERINDAG dengan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah

DINPERINDAG berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu indikator utama dalam pencapaian tujuan ini adalah meningkatnya Nilai Kematangan Perangkat Daerah, yang mencerminkan sejauh mana kelembagaan DINPERINDAG telah memenuhi standar dalam aspek tata kelola, kinerja organisasi, serta peran strategisnya dalam pembangunan sektor industri dan perdagangan.

Peningkatan nilai kematangan ini akan ditempuh melalui berbagai upaya strategis, seperti penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja yang lebih transparan dan akuntabel

Tujuan
Meningkatnya kualitas kelembagaan DINPERINDAG

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Sat	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas kelembagaan DINPERINDAG	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	38	38	41	42	41	97.62%
Nilai Realisasi Kinerja								Sangat Tinggi

Pada tahun 2024, Nilai Kematangan Perangkat Daerah DINPERINDAG masih tetap di angka 41%, sama seperti capaian tahun 2023. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas kelembagaan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai kematangan belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Jika dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian ini hanya mencapai 97,62% dari target yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa aspek dalam tata kelola kelembagaan yang perlu diperkuat agar dapat mencapai target yang lebih optimal.



Ke depan, DINPERINDAG akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam berbagai aspek kelembagaan guna meningkatkan Nilai Kematangan Perangkat Daerah. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh meliputi penguatan tata kelola

berbasis kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Dengan komitmen yang lebih kuat dan strategi yang tepat, diharapkan Nilai Kematangan Perangkat Daerah dapat meningkat di tahun-tahun mendatang, sehingga DINPERINDAG dapat menjadi institusi yang lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing dalam mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di daerah

e. Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP DINPERINDAG dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP DINPERINDAG

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil, DINPERINDAG berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan implementasi ini adalah Nilai SAKIP DINPERINDAG, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi.

**Tabel Sasaran
Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG**

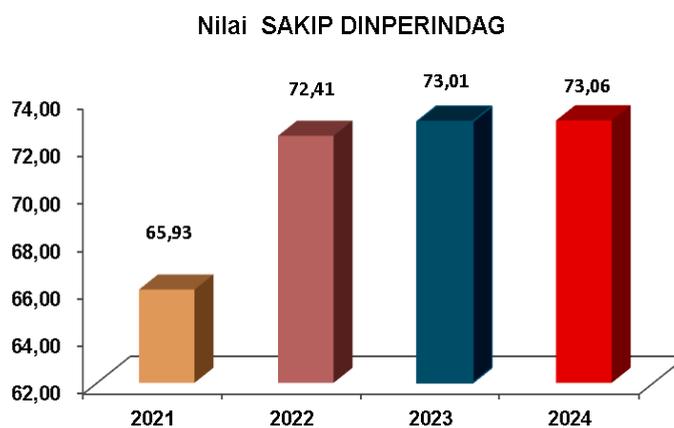
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya Implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	65,93	72,41	73,01	73,05	73,06	100,01
Nilai Realisasi Kinerja								Sangat Tinggi

Pada tahun ini, Nilai SAKIP DINPERINDAG mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas

kinerja. Peningkatan ini didukung oleh berbagai strategi dan langkah konkret, di antaranya:

- 1) Penguatan perencanaan kinerja, dengan memastikan setiap program dan kegiatan selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis DINPERINDAG.
- 2) Optimalisasi pengukuran kinerja, melalui penggunaan indikator yang lebih jelas, terukur, dan berbasis hasil untuk meningkatkan efektivitas evaluasi kinerja.
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dengan memperbaiki mekanisme pelaporan kinerja dan memastikan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya.
- 4) Pengembangan kapasitas SDM, agar seluruh pegawai memahami dan mampu mengimplementasikan SAKIP secara lebih baik.

Meskipun telah terjadi peningkatan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai nilai yang lebih optimal.



1) Hambatan/Kendala yang Dihadapi

Hambatan dalam pencapaian target kinerja Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG diantaranya adalah :

- Masih banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya SAKIP;
- Budaya birokrasi yang masih konvensional dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan besar. Banyak pegawai yang merasa nyaman dengan sistem lama dan enggan beradaptasi dengan sistem baru;

2) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

- Meningkatkan kapasitas dan pemahaman pegawai melalui nonton bareng di youtube tentang SAKIP
- Mendorong perubahan budaya kerja dan meningkatkan komitmen pimpinan instansi terhadap implementasi SAKIP

Untuk mendukung **Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan DINPERINDAG** dengan Indikator **Nilai Kematangan Perangkat Daerah** dan **Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP DINPERINDAG**, dengan indikator **Nilai SAKIP DINPERINDAG**, diperlukan implementasi berbagai program strategis yang mendukung indikator kinerja ini, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program ini juga didukung kegiatan dan su kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebesar Rp 14.404.739.116,00 atau sebesar 96,64% dari total anggaran sebesar Rp 14.904.892.000,00 dari realisasi anggaran tersebut, sebesar Rp. 7.262.324.168,00 merupakan pengeluaran atas belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang dapat dicapai Tahun 2024 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9.992.000	8.194.300	82,01
I.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.996.000	3.458.700	69,23
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.996.000	3.458.700	69,23
II.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4.996.000	4.735.600	94,79
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4.996.000	4.735.600	94,79
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.470.307.000	4.360.610.496	97,55
I.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.406.138.000	4.296.556.746	97,51
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	959.353.000	954.457.145	99,49
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.446.785.000	3.342.099.601	96,96

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
II.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	64.169.000	64.053.750	99,82
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	64.169.000	64.053.750	99,82
C	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	567.047.000	555.268.350	97,92
I.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	546.568.000	535.081.750	97,90
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	11.288.000	11.060.000	97,98
2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	535.280.000	524.021.750	97,90
II.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	14.485.000	14.414.300	99,51
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14.485.000	14.414.300	99,51
III.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.994.000	5.772.300	96,30
1	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5.994.000	5.772.300	96,30
D	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	39.960.000	39.753.618	99,48
I.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.960.000	39.753.618	99,48
1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	39.960.000	39.753.618	99,48
E.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	290.412.000	288.524.764	99,35
I.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	290.412.000	288.524.764	99,35
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,	290.412.000	288.524.764	99,35

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Tera Ulang			
F	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100.000.000	99.745.000	99,75
I.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100.000.000	99.745.000	99,75
1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	99.745.000	99,75
G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.696.072.000	8.339.984.026	95,91
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.300.000	3.098.900	93,91
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.689.800	93,88
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.409.100	93,94
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.708.570.000	7.381.453.353	95,76
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.589.382.000	7.262.324.168	95,69
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.475.000	62.416.685	99,91
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	56.713.000	56.712.500	100,00
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.331.000	1.500.000	64,35
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.331.000	1.500.000	64,35
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.000.000	103.456.000	99,48
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000	3.956.000	98,90
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	99.500.000	99,50
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.943.000	38.154.100	97,97
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.332.000	1.312.500	98,54
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.487.000	27.161.600	98,82
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	800.000	780.000	97,50
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.660.000	6.500.000	97,60
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2.664.000	2.400.000	90,09

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Berbasis Elektronik pada SKPD			
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.550.000	693.969.323	96,44
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.165.000	0	0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.817.000	173.614.255	93,94
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.568.000	520.355.068	97,52
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.378.000	118.352.350	99,14
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.768.000	109.742.350	99,07
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.610.000	8.610.000	100,00
H	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	723.102.000	704.769.062	97,46
I.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	723.102.000	704.769.062	97,46
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8.830.000	8.829.500	99,99
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	189.323.000	182.878.729	96,60
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	400.972.000	390.573.934	97,41
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	123.977.000	122.486.899	98,80
I	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	4.000.000	3.962.500	99,06
I.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000	3.962.500	99,06
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000	3.962.500	99,06
J	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	4.000.000	3.927.000	98,18
I.	Penyediaan Informasi Industri untuk	4.000.000	3.927.000	98,18

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4.000.000	3.927.000	98,18
JUMLAH		14.904.892.000	14.404.739.116	96,64

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp 14.904.892.00000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp 14.404.739.116

Sisa Anggaran Tahun 2024 : Rp. 500.152.884

Nilai capaian Realisasi Keuangan Tahun 2024 : 96,64%

Analisis Efisiensi Sumber Daya :

Pencapaian kinerja sasaran urusan Perindustrian didukung dengan Program sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung
Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung
		Negeri
Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP Dinperindag	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja	Sat	Target	Real	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian									
1	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Persen	28,49	28,27	99,23	731.102.000	712.658.562	97,48	1,75
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan									
1	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	12,7	12,65	99,61	5.377.718.000	5.252.351.528	97,67	1,94
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri									
1	Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	75	71,16	94,88	100.000.000	99.745.000	99,75	-4,87
Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG									

Sasaran dan Indikator Kinerja		Sat	Target	Real	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	73,05	73,06	100,01	8.696.072.000	8.339.984.026	95,91	4,10

Adapun analisis atas efektifitas penggunaan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	Sat	Capaian (%)	Realisasi	Capaian Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian					
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	77,27	731.102.000	712.658.562	Tidak Efisien
Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian					
1 Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Persen	99,23	712.658.562	97,48	Efisien
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan					
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	97,27	5.377.718.000	5.252.351.528	Efisien
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan					
1 Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	99,61	5.252.351.528	97,67	Efisien
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri					
1 Prosentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	94,88	99.745.000	99,75	Tidak Efisien
Meningkatnya kualitas kelembagaan					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	Sat	Capaian (%)	Realisasi	Capaian Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
DINPERINDAG					
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	97,62	8.696.072.000	8.339.984.026	Efisien
Meningkatnya Implementasi SAKIP DINPERINDAG					
1 Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	100,01	8.339.984.026	95,91	Efisien

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian

Tujuan Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dikatakan tidak efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sebesar Rp. 731.102.000 terealisasi sebesar Rp. 712.658.562 atau sebesar 97,84% dibandingkan capaian kinerja tujuan sebesar 77,27%. Tidak Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh melemahnya daya beli konsumen, sehingga mengakibatkan jumlah permintaan barang menurun.

2) Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian

Sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian dengan indikator kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.731.102.000 terealisasi sebesar Rp. 712.658.562 atau sebesar 97,481% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 99,23%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Kegiatan peningkatan sumber daya industri melalui peningkatan kualitas SDM;

- b. Peningkatan kualitas produksi melalui peningkatan sarana prasarana industri;
- 3) Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan
- Tujuan Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dikatakan tidak efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sebesar Rp.5.377.718.000 dengan realisasi Rp. 5.252.351.528 atau sebesar 97,67% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 97,27%. Tidak Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :
- a. Daya beli masyarakat menurun;
 - b. Ketidakseimbangan antara Permintaan dan Pasokan sehingga mengakibatkan kelangkaan produk, sehingga harga barang tidak stabil;
- 4) Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan
- Sasaran Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator kinerja Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB) dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.5.377.718.000 dengan realisasi Rp. 5.252.351.528 atau sebesar 97,67% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,61%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :
- a. Adanya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan bagi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan;
 - b. Monitoring stabilitasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. Peningkatan Citra Produk Ekspor melalui pelatihan ekspor ;
 - d. Standarisasi dan perlindungan konsumen melalui Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- 5) Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Sasaran Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dengan indikator Prosentase penggunaan produk dalam negeri dikatakan tidak efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang

digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.100.000.000, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 99.745.000,00 atau sebesar 96,36% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,88%. Tidak Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Sosialisasi penggunaan PDN pengadaan barang jasa dilingkungan Pemerintah Daerah masih kurang optimal;
- b. Masih banyak penyedia barang jasa yang belum masuk e-katalog;

6) Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG

Tujuan Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sebesar Rp.8.696.072.000 dengan realisasi Rp. 8.339.984.026 atau sebesar 95,91% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 97,62%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Pengelolaan anggaran secara optimal;
- b. Masih banyak penyedia barang jasa yang belum masuk e-katalog;

7) Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG

Untuk Sasaran Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG dengan indikator kinerja Nilai SAKIP DINPERINDAG dikatakan efisien dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.8.696.072.000 dengan realisasi Rp. 8.339.984.026 atau sebesar 95,91% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,01%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Sosialisasi SAKIP kepada setiap pegawai;
- b. Melakukan perbaikan target Indikator Kinerja Utama;
- c. Berusaha melaksanakan hasil rekomendasi tim Evaluator SAKIP Inspektorat.

BAB IV P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga merupakan dinas yang memegang tugas dan fungsi dua urusan pemerintah yaitu urusan di bidang perindustrian dan urusan di bidang perdagangan, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah dengan mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya yaitu sektor industri pengolahan dan manufaktur, serta sektor perdagangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 cukup baik. Adapun pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Real 2024	Capaian 2024
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,50	4,25	77,27

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Real 2024	Capaian 2024
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Persen	28,49	28,27	99,23
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,50	5,35	97,27
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	12,70	12,65	99,61
		Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	75,00	71,16	94,88
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINPERINDAG		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	42,00	41,00	97,62
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	73,05	73,06	100,01
RATA RATA							95,13

Dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dilihat dari capaian kinerja menunjukkan pada kategori **Sangat Tinggi** yaitu rata-rata capaian kinerja **95,13%**. Namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja tujuan dan sasaran yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024.

Tabel Realisasi Keuangan

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	9.992.000	8.194.300	82,01
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.470.307.000	4.360.610.496	97,55
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	567.047.000	555.268.350	97,92
4	Program Pengembangan Ekspor	39.960.000	39.753.618	99,48
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	290.412.000	288.524.764	99,35
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100.000.000	99.745.000	99,75
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.696.072.000	8.339.984.026	95,91
8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	723.102.000	704.769.062	97,46
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	4.000.000	3.962.500	99,06
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	4.000.000	3.927.000	98,18
JUMLAH		14.904.892.000	14.404.739.116	96,64

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain :

1. Terkait Pencapaian Sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian
 - a. Pembangunan infrastruktur industri berbasis keunggulan lokal melalui pengembangan kawasan industri dan sentra IKM dengan fasilitas dan insentif yang mendorong pertumbuhan sektor industri berbasis sumber daya daerah;
 - b. Peningkatan kualitas produk IKM melalui peningkatan teknologi dalam hal peralatan produksi sehingga kualitas produk menjadi lebih baik;

- c. Peningkatan kualitas SDM IKM, sehingga mampu menciptakan Entrepreneur yang handal dan inovatif;
 - d. Memfasilitasi IKM dalam mempromosikan produknya melalui pameran lokal, regional, nasional maupun internasional;
 - e. Peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi produk seperti sertifikasi PIRT, halal, paten, dan BPOM;
2. Terkait Pencapaian Sasaran Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan
- a. Transformasi Digital dalam Sektor Perdagangan melalui pengembangan ekosistem perdagangan berbasis digital, termasuk e-commerce dan sistem pembayaran digital untuk memperluas jangkauan pasar;
 - b. Modernisasi pasar rakyat menjadi pasar modern melalui revitalisasi infrastruktur, digitalisasi transaksi, serta peningkatan kualitas produk dan layanan;
 - c. Meningkatkan pengetahuan ekspor bagi UKM yang prospektif ekspor;
3. Terkait Pencapaian Sasaran Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
- a. Penguatan kegiatan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. Peningkatan intensitas pengawasan penggunaan produk dalam negeri oleh tim P3DN;
 - c. Implementasi kebijakan preferensi produk dalam negeri dalam proses pengadaan pemerintah daerah;
 - d. Pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi kebijakan preferensi produk dalam negeri di pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya
4. Terkait Pencapaian Sasaran Meningkatnya implementasi SAKIP DINPERINDAG
- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya SAKIP di antara staf dan pimpinan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Pemimpin organisasi perlu memberikan

dukungan penuh dan menunjukkan komitmen dalam menerapkan SAKIP;

- b. Meningkatkan pemahaman pegawai tentang SAKIP melalui pelatihan-pelatihan/ in house training terutama terhadap Tim Penerapan SAKIP Internal;
- c. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SAKIP untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan

Purbalingga, Maret 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga



JOHAN ARIFIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19740520 199803 1 004